



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Mei 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : BIRO UMUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUNARTI**
2. Jabatan : **ARSIPARIS MADYA**
3. NHK : **143896**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 335.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di BOGOR, Rp. 135.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 154.000.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA FIT SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOBIL, --- MINIBUS Tahun 1900, Rp. 85.000.000
4. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z SEPEDA MOTOR Tahun 1900, Rp. 8.000.000
5. MOBIL, --- MINIBUS Tahun 1900, Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 5.000.000****D. SURAT BERTAGIH** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 313.000****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ---**

Sub Total **Rp. 494.313.000**

III. HUTANG **Rp. ---****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp. 494.313.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **18 September 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.